

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin, Firmansyah, dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, KRHN bekerjasama dengan MKRI, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rienika Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- _____, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Barnett, Hilaire, 2002, *Constitutional and Administrative Law*, Cavendish Publishing, London,
- Fatwa, A.M., 2009, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Kompas, Jakarta.
- Fukuyama, Francis, 2002, *The End History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, Qalam, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2007, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2016, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktek di Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.
- Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan, 2010, *Profil Lembaga Non Struktural di Indonesia*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2012, *Profil Lembaga Non Struktural di Indonesia*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2013, *Profil Lembaga Non Struktural di Indonesia*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Denny Indrayana, 2007, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Jakarta.

_____, 2008, *Negara antara Ada dan Tiada; Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Kompas, Jakarta.

Kansil, C.S.T., 2004, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta

Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

M.D, Moh. Mahfud, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung.

_____, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mochtar, Zainal Arifin, 2016, *Lembaga Negara Independent: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataanya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Montesqueiu, 2011, *The Spirit of Laws, Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, Cet. Keempat*, Nusa Media, Bandung.

Harun, Refli, dkk, 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.

Pierson, Christopher, 2004, *The Modern State*, Routledge, New York.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suharto, Susilo, 2006, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Trisulo D. Evi, *et.al*, 2015, *Kajian Kelembagaan Sekretariat Informasi*, Komisi Informasi Pusat RI, Jakarta.

Zoelva, Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Aghion, Philippe, *et.al*, 2002, “Edogenous Politcal Institution”, *The Quarterly Journal of Economics*, MIT Press, Vol. 119.

Anggono, Bayu Dwi, 2014, “Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, Nomor 3, September.

- Asshidiqie, Jimly, 2011, “Beberapa Catatan Tentang Lembaga-Lembaga Khusus dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, *Seminar Nasional Lembaga-Lembaga Non Struktural*, Kementerian Pertahanan, Maret.
- Basarah, Ahmad, 2014, Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 43 No. 1 Januari.
- Effendi, Taufiq, 2010, “Efektivitas Kelembagaan dan Strategi Penataan Lembaga Non Struktural: Sebuah Tinjauan Administrasi Negara”, *Jurnal Negarawan*, No. 18 November.
- Lay, Cornelis, 2006, “State Auxiliary Agencies”, dalam *Jurnal Jentera* Edisi 12 Tahun III, PSHK, Jakarta, April-Juni.
- Soemantri, Sri, 2007, “Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945”, *Makalah*, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum, Departemen Hukum dan HAM RI, Surabaya 26-29 Juni.
- Muladi, 2010, “Penataan Lembaga Non-Struktural (LNS) Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Serta Upaya Formulasi Kebijakan Strategis Kelembagaan Negara”, *Jurnal Negarawan*, No. 18 November.
- Zoelva, Hamdan, 2010, “Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia”, *Jurnal Negarawan*, No. 18 November.

C. Tugas Akhir/Laporan Penelitian

- Andi Sandi Antonius T.T. dan Dian Agung Wicaksono, 2014, Penataan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Laporan Penelitian Dosen 2014*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____, 2015, “Penataan Lembaga Non Struktural (LNS) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Laporan Hasil Penelitian Program Hibah Penelitian Dosen Kelompok Periode II Tahun 2015*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Risdi Martono, 2015, “Penataan Kelembagaan Lembaga Non Struktural Melalui Reformasi Birokrasi: Studi Kasus Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia” *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Yuli Rohmawati, 2011, “*Penataan Kembali Lembaga Non-Struktural Dalam Upaya Penyelarasan Dengan Sistem Keuangan Negara*”, *Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya*.

D. Internet

Kumparan, *Memahami Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila*, <https://kumparan.com/@kumparannews/memahami-fungsi-unit-kerja-presiden-pembinaan-ideologi-pancasila>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2018.

Kompas, 2018, *UKP PIP Jadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudi Latief Nilai Tak Sama dengan BP7*, <https://kompas.id/baca/x/politik/2018/01/11/ukp-pip-jadi-badan-pembinaan-ideologi-pancasila-yudi-latief-nilai-tak-sama-dengan-bp7/>. Diakses Tanggal 17 Maret 2018.

Merdeka, 2018, *UKP-PIP diubah Menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ukp-pip-diubah-menjadi-badan-pembinaan-ideologi-pancasila.html>. Diakses Tanggal 17 Maret 2018.

Tribun News, "UKP-PIP Berubah Nama Menjadi Badan Pembina Ideologi Pancasila Tribunnews .com". *Tribunnews.com*. Diakses tanggal 2018-05-02.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPRS Nomor X/MPRS/1969 Tentang Kedudukan Semua Lembaga Negara Tingkat Pusat Dan Daerah Pada Posisi Dan Fungsi yang Diatur dalam UUD 1945.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 Tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Antar Lembaga Tinggi Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3425).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3997).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Susunan Organ, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5210).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515).

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 79).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Dewan Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 132).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 162).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202).

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 63).
- Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 111).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 75).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Bada Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Badan Pengelolaan Dana Abadi Umat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 144)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 113).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 63).

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2012 Tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 223).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2014 Tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 373).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 184).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 56).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1999 Tentang Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1999 Tentang Dewan Penerbangan Angkasa Nasional Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 Tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 221).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 1999 Tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Komisi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 56).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2000 Tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79).

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Dewan Gula Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 122).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 71).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 Tentang Komite Akreditasi Nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2001 Tentang Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90).

Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 Tentang Dewan Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 97).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 133).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 54).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 54).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Dewan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 213).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 173).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 56).

Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor PER-0342.J/
MENPORA/IX/2009 Tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia
(BOPI).